



PUTUSAN

Nomor 2842/Pdt.G/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 13 Juni 1995 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta (Alat Kesehatan), Alamat Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Maros 12 September 1990 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak diketahui, Alamat Dusun Matana (rumah atas nama XXXXXXXXXXXX), Dese Tellumpocco, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2842/Pdt.G/2021/PA.Mks. tertanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 2842/Pdt.G/2021/PA Mks



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0825/40/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, 4 tahun 9 bulan;
 - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, 2 tahun 11 bulan;Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Oktober 2017 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar permasalahan ekonomi;
 - c. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Januari 2018;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juni 2019, yang disebabkan karena Tergugat terbukti memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat meninggalkan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan dan diketahui saat ini Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan perempuan lain;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 2842/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Maros sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, tertanggal 22 Desember 2021;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tercatat di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Makassar tertanggal 16 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa, Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0825/40/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan masalah ekonomi, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Januari 2018;
- Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2019, disebabkan karena Tergugat terbukti memiliki hubungan istimewa dengan perempuan



lain, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 tahun 6 bulan secara berturut-turut;

- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua:

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah kakak Penggugat.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan masalah ekonomi, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Januari 2018;
- Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2019, disebabkan karena Tergugat terbukti memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 tahun 6 bulan secara berturut-turut;
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Oktober 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan masalah ekonomi, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Januari 2018, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan berturut-turut dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 2842/Pdt.G/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0825/40/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relas panggilan) yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 22 Desember 2021, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. XXXXXXXXXXXXX, dan 2. XXXXXXXXXXXXX, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan antara keduanya;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah tidak lagi harmonis selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan secara berturut-turut;



adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak Oktober 2017 sampai dengan sekarang dianggap dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dianggap telah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa hal Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan secara berturut-turut dan sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan karena telah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama itu tidak pernah kembali hidup rukun sebagai selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa, Para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga Penggugat sudah tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, apalagi Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah



tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat ketimbang bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stress bagi penggugat dan tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة



Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa* mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة كالكلية يقتضى وجوه من الضرر والاخلال منها ان من المطابع ما لا يألأف بعض المطابع فكلاما اجتهادى المجمع بينهما زاد المشرو والبنو [اي الاخلاف] تنغضت المعاش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab *Al mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun*, sebagai berikut:

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تأفها فإين كان من ال خير ان تنتهى العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا لحياته يخدمه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 2842/Pdt.G/2021/PA Mks



sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya “Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan”;

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Kartini

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 2842/Pdt.G/2021/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 310.000,-
4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 2842/Pdt.G/2021/PA Mks